

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	iii
Abstrak.....	vii
Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik <i>Sulasi Rongiyati</i>	1 - 25
Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan <i>Dian Cahyaningrum</i>	27 - 48
Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten <i>Trias Palupi Kurnianingrum</i>	49 - 65
Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi <i>Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya</i>	67 - 88
Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal? <i>Puteri Hikmawati</i>	89 - 107
Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi <i>Gema Perdana</i>	109 - 128
<i>Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty, dan Elma Putri Tanbun</i>	129 - 148
Pedoman Penulisan	

PENGANTAR REDAKSI

Jurnal Ilmiah Negara Hukum kembali terbit pada bulan Juni 2019 ini, dimana para penulis menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk hasil penelitian dan kajian terhadap berbagai masalah hukum, dengan tujuan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan di bidang hukum. Sebagai jurnal di lingkungan DPR RI, Jurnal Negara Hukum berupaya menghadirkan artikel untuk menjembatani kebutuhan DPR RI dalam pelaksanaan fungsinya, baik fungsi legislasi maupun pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Penerbitan Jurnal Negara Hukum Edisi Juni 2019 merupakan tahun ke sepuluh, yang memuat hasil kajian literatur dan penelitian empiris, meliputi hukum ekonomi, hukum pidana, dan hukum tata negara/administrasi negara.

Publikasi artikel yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum dilakukan setelah melalui proses koreksi dan seleksi dari Mitra Bestari dan Dewan Redaksi, serta diputuskan dalam Rapat Dewan Redaksi. Pada terbitan kali ini Jurnal Negara Hukum memuat 7 (tujuh) artikel. Berikut akan diuraikan secara singkat isi dari setiap artikel.

Artikel pertama mengenai hukum ekonomi, berjudul “Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik” merupakan karya Sulasi Rongiyati. Menurut Penulis, transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, menunjukkan pelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem elektronik belum dapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungan konsumen dalam transaksi dagang secara elektronik secara keseluruhan, khususnya dalam hal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa konsumen, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara *online* dapat dilaksanakan secara penuh. Pada bagian akhir, Penulis menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk peraturan pemerintah tentang transaksi dagang melalui sistem elektronik dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara *online*.

“Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan” merupakan karya kedua yang ditulis oleh Dian Cahyaningrum. Dalam artikelnya, Penulis mengatakan alih fungsi lahan pertanian pangan terjadi di berbagai daerah, termasuk Karawang dan Tabanan. Akibatnya ketahanan pangan terancam. Tulisan ini mengkaji pentingnya pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan, upaya untuk melindunginya, penyebab pengalihan lahan pertanian pangan, dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer. Berdasarkan hasil penelitian, lahan pertanian pangan penting untuk dilindungi agar ketahanan pangan terwujud, hak rakyat atas pangan terpenuhi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya untuk melindungi dilakukan secara preventif dan represif. Meskipun dilindungi, alih fungsi lahan pertanian pangan tetap terjadi.

Beberapa penyebab yang disebutkan oleh Penulis, yaitu ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan belum ditindaklanjuti, desakan kebutuhan lahan untuk kepentingan lain, dan rendahnya penghasilan petani. Selanjutnya, penulis menyebutkan upaya untuk mengatasinya, yaitu membuat regulasi tindak lanjut ketentuan perlindungan lahan pertanian pangan, mengendalikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), melindungi dan memberdayakan petani. Oleh karena itu, Pemerintah/pemerintah daerah harus melakukan segala upaya untuk melindungi lahan pertanian pangan dan menjadikan sektor pertanian menarik.

Berikutnya, artikel ketiga berjudul “Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten”, ditulis oleh Trias Palupi Kurnianingrum. Penulis mengatakan, bahwa paten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, salah satunya obat-obatan. Maraknya kasus pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan untuk tujuan komersialisasi menunjukkan bahwa pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, membahas mengenai pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional dan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Di dalam hasil penelitian, disebutkan bahwa meskipun Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) belum mengakomodasi pengetahuan tradisional, namun hadirnya UU No. 13 Tahun 2016 melengkapi usaha pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan pengetahuan obat tradisional dari *biopiracy* dan *misappropriation*. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan kewajiban *disclosure* di dalam Perjanjian TRIPs dan mekanisme lebih lanjut mengenai *benefit sharing* dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

Artikel keempat mengenai hukum pidana, berjudul “Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi”, ditulis oleh Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya. Menurut kedua Penulis, praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif, yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal, ada perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan oleh keterpaksaan. Kondisi ini menimbulkan bias terhadap kedudukan korban dalam praktik prostitusi. Karya tulis ini mengkaji keterlibatan perempuan dalam praktik prostitusi sekaligus mengetahui kedudukan perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Perempuan sebagai pelaku apabila terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya, sedangkan perempuan sebagai korban apabila bertindak sebagai pemberi jasa, menderita, karena dan daya paksa dari orang lain. Selain itu, syarat relatif perempuan sebagai korban dalam prostitusi manakala terlibat dalam praktik prostitusi karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi sebagai mata pencaharian. Oleh karena itu, diharapkan pembentuk undang-undang segera mungkin merumuskan mengenai batasan korban dalam rangka pembaharuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Berkaitan dengan hukum pidana juga, artikel mengenai “Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?” ditulis oleh Puteri Hikmawati. Selain dapat dijatuhi pidana pokok, dikatakan oleh Penulis, bahwa terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pembayaran uang

pengganti. Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif ini, mempertanyakan dapatkah pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi optimal?. Dalam pembahasan, Penulis menguraikan bahwa pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. Untuk itu, UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Artikel keenam mengenai “Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi” merupakan karya Gema Perdana. Penulis mengatakan, bahwa netralitas aparatur sipil negara (ASN) dan politisasi birokrasi masih menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Dalam artikel ini dibahas mengenai sejarah pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan netralitas ASN. Artikel ini merupakan hasil penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen ASN yang bebas dari intervensi politik dan bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarahnya, netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Lembaga baru Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem merit. Selanjutnya, Penulis mengatakan, perlunya regulasi dalam rangka pengetatan akses pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan akses pengawasan yang ketat dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi.

Naskah terakhir atau artikel ketujuh merupakan karya Xavier Nugraha bersama-sama dengan Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty, dan Elma Putri Tanbun. Artikel yang berjudul “*Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia*” merupakan penelitian hukum dogmatik. Wewenang Mahkamah Konstitusi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara penuh. Hal ini tercermin dari pengujian yang diakomodasi hanyalah melingkupi *abstract review* (belum adanya kasus konkrit di pengadilan). Menurut para Penulis, kondisi ini menyebabkan tidak adanya upaya hukum menyelesaikan persoalan konstitusionalitas norma hukum di pengadilan (*concrete review*), padahal sering kali persoalan konstitusionalitas undang-undang justru ditemukan dari proses di pengadilan. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa perlu diterapkannya *constitutional question* supaya undang-undang yang diujikan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus terkait kasus yang diujikan secara konkrit.

Hasil pemikiran dan penelitian yang dimuat dalam Jurnal Negara Hukum ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan pembaca serta menjadi referensi, baik untuk

bahan penelitian lanjutan atau membuat kajian yang lebih mendalam, maupun perumusan kebijakan atau norma hukum. Hukum selalu berkembang mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat yang dinamis, sehingga terbuka kemungkinan munculnya permasalahan hukum baru yang perlu diselesaikan, dengan melakukan pengkajian dan penelitian, yang dituangkan dalam suatu artikel. Selamat membaca.

Jakarta, Juni 2019

Redaksi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Pelindungan Konsumen dalam Transaksi Dagang Melalui Sistem Elektronik

Sulasi Rongiyati

Abstrak

Transaksi dagang melalui sistem elektronik di Indonesia terus berkembang. Sebagai transaksi yang memiliki karakteristik khusus yang melibatkan para pihak lintas yuridiksi tanpa harus bertemu fisik, sangat diperlukan pelindungan hukum bagi konsumen. Melalui metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini mengkaji pelindungan konsumen dalam transaksi dagang melalui sistem elektronik dan penyelesaian sengketa. Hasil penelitian menunjukkan pelindungan terhadap konsumen pada transaksi dagang melalui sistem elektronik belum dapat dilakukan secara optimal karena pengaturannya masih tersebar dalam beberapa Undang-Undang (UU) yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Di samping itu UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum mampu menjangkau pelindungan konsumen dalam transaksi dagang secara elektronik secara keseluruhan, khususnya dalam hal para pihak memiliki perbedaan yurisdiksi. Sedangkan dalam hal sengketa konsumen, para pihak dapat menempuh jalur pengadilan maupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak, namun alternatif penyelesaian sengketa secara *online* dapat dilaksanakan secara penuh. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang transaksi dagang melalui sistem elektronik dan mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara *online*.

Kata kunci: pelindungan hukum; konsumen; transaksi dagang secara elektronik

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Pelindungan Hukum Terhadap Lahan Pertanian Pangan dari Pengalihan Fungsi untuk Non Pertanian Pangan

Dian Cahyaningrum

Abstrak

Alih fungsi lahan pertanian pangan terjadi di berbagai daerah, termasuk Karawang dan Tabanan. Akibatnya ketahanan pangan terancam. Tulisan ini mengkaji pentingnya pelindungan hukum terhadap lahan pertanian pangan, upaya untuk melindunginya, penyebab pengalihan lahan pertanian pangan, dan solusinya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris, dengan menggunakan data sekunder dan primer. Berdasarkan hasil penelitian, lahan pertanian pangan penting untuk dilindungi agar ketahanan pangan terwujud, hak rakyat atas pangan terpenuhi, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Upaya untuk melindungi dilakukan secara preventif dan represif. Meskipun dilindungi, alih fungsi lahan pertanian pangan tetap terjadi. Beberapa penyebabnya: ketentuan pelindungan lahan pertanian pangan belum ditindaklanjuti, desakan kebutuhan lahan untuk kepentingan lain, dan rendahnya penghasilan petani. Beberapa upaya untuk mengatasinya: membuat regulasi teknis mengenai pelindungan lahan pertanian pangan, mengendalikan LP2B, melindungi dan memberdayakan petani. Pemerintah/pemerintah daerah harus melakukan segala upaya untuk melindungi lahan pertanian pangan dan menjadikan sektor pertanian menarik.

Kata kunci: alih fungsi; lahan pertanian pangan; petani; rencana tata ruang wilayah

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstrak

Paten merupakan salah satu cabang Hak Kekayaan Intelektual yang berfungsi untuk melindungi invensi di bidang teknologi, salah satunya obat-obatan. Maraknya kasus pencurian sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di bidang obat-obatan untuk tujuan komersialisasi menunjukkan bahwa pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional masih belum maksimal. Artikel ini merupakan hasil penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris, membahas mengenai pelindungan hak paten atas pengetahuan obat tradisional dan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten 2016). Di dalam hasil penelitian, disebutkan meskipun Perjanjian *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs) belum mengakomodasi pengetahuan tradisional namun hadirnya UU Paten 2016 melengkapi usaha pemerintah Indonesia dalam menyelamatkan pengetahuan obat tradisional dari *biopiracy* dan *misappropriation*. Perlu pengaturan kewajiban *disclosure* di dalam Perjanjian TRIPs dan mekanisme lebih lanjut mengenai *benefit sharing* dan pemberian akses atas pengetahuan obat tradisional.

Kata kunci: *biopiracy*; paten; pengetahuan obat tradisional; pelindungan

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Perempuan dalam Prostitusi: Konstruksi Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Indonesia dari Perspektif Yuridis dan Viktimologi

Yaris Adhial Fajrin dan Ach. Faisol Triwijaya

Abstrak

Praktik prostitusi yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama menimbulkan stigma negatif yang memandang perempuan sebagai insan yang bersalah. Padahal adapula perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi diakibatkan keterpaksaan. Kondisi ini menimbulkan bias terhadap kedudukan korban dalam praktik prostitusi. Tulisan ini untuk mengkaji keterlibatan perempuan dalam praktik prostitusi sekaligus mengetahui kedudukan perempuan yang terlibat dalam praktik prostitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Perempuan dalam jaringan prostitusi dapat teridentifikasi sebagai korban akibat tekanan internal maupun eksternalnya. Perempuan sebagai pelaku apabila terlibat tanpa tekanan dari pihak di luar dirinya. Perempuan sebagai korban apabila bertindak sebagai pemberi jasa, menderita, karena dan daya paksa dari orang lain, selain itu syarat relatif perempuan sebagai korban dalam prostitusi manakala terlibat dalam praktik prostitusi karena pernah menjadi korban kekerasan seksual dan prostitusi sebagai mata pencaharian. Diharapkan pembentuk undang-undang segera mungkin untuk merumuskan mengenai batasan korban dalam rangka pembaharuan hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Kata kunci: perempuan; korban; prostitusi; viktimologi; pelindungan hukum

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dari Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi, Dapatkah Optimal?

Puteri Hikmawati

Abstrak

Selain dapat dijatuhi pidana pokok, terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan, berupa pembayaran uang pengganti. Artikel yang merupakan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif ini, mengkaji pengembalian kerugian keuangan negara dari pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi dapatkah optimal?. Dalam pembahasan, pidana pembayaran uang pengganti telah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Jumlah pembayaran uang pengganti sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Apabila uang pengganti tidak dibayar, maka terpidana dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya. Oleh karena itu, pengembalian kerugian keuangan negara tidak dapat optimal. Jumlah pengganti kerugian keuangan negara perlu ditingkatkan, dengan melakukan penyitaan dan perampasan terhadap aset/harta kekayaan pelaku. UU Perampasan Aset perlu dibentuk sebagai dasar hukum perampasan aset dari hasil korupsi.

Kata kunci: kerugian keuangan negara; pembayaran uang pengganti; tindak pidana; korupsi

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi

Gema Perdana

Abstrak

Netralitas ASN dan politisasi birokrasi masih menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi. Tulisan ini membahas mengenai sejarah pengaturan netralitas ASN; pengaruh politisasi birokrasi terhadap netralitas ASN; dan peran KASN untuk mewujudkan netralitas ASN. Tulisan ini merupakan hasil penelitian hukum normatif (*normative legal research*), dengan menggunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Tulisan ini bertujuan memberikan kontribusi dalam perumusan manajemen ASN yang bebas dari intervensi politik dan bekerja semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara. Dalam sejarahnya, netralitas ASN sangat dipengaruhi oleh keinginan dari pembentuk undang-undang. Pejabat publik, baik berasal dari politik ataupun independen, tidak seharusnya menempatkan ASN sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya. Lembaga baru Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) diharapkan mampu menjaga kualitas pelaksanaan sistem merit. Selanjutnya, diperlukan regulasi dalam rangka pengetatan akses pejabat publik untuk menyalahgunakan kewenangan, serta memberikan akses pengawasan yang ketat dari para pihak termasuk internal ASN untuk dapat melaporkan segala bentuk intervensi.

Kata kunci: netralitas ASN; politisasi birokrasi; pelayanan publik

Kata Kunci bersumber dari artikel. Lembar Abstrak ini boleh difotokopi

Constitutional Question: Alternatif Baru Pelindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Concrete Review di Indonesia

**Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty,
dan Elma Putri Tanbun**

Abstrak

Wewenang Mahkamah Konstitusi yang ada dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum melindungi hak-hak konstitusional warga negara secara penuh. Hal ini tercermin dari pengujian yang diakomodasi hanyalah melingkupi *abstract review* (belum adanya kasus konkrit di pengadilan). Kondisi ini menyebabkan tidak adanya upaya hukum menyelesaikan persoalan konstitusionalitas norma hukum di pengadilan (*concrete review*), padahal sering kali persoalan konstitusionalitas undang-undang justru ditemukan dari proses di pengadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dogmatik. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari buku, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa perlu diterapkannya *constitutional question* supaya undang-undang yang diujikan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan pasal yang dinilai bertentangan dengan konstitusi tersebut tidak dapat dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus terkait kasus yang diujikan secara konkrit.

Kata kunci: *constitutional question*; *concrete review*; Mahkamah Konstitusi

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

Consumer Protection in E-Commerce

Sulasi Rongiyati

Abstract

E-commerce in Indonesia is continuing to grow. As a transactions with a special characteristic which involves parties across many jurisdictions without having to be physically present, a form of legal protection is highly required for the consumers. Through the normative juridical research method, this paper examines consumer protection in trade transaction through electronic system (E-Commerce) and its dispute resolution. The result of the research show that the consumer protection cannot be maximally implemented because regulating it is still distributed in several laws and requesting implementing regulations. In addition, Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection has not been able to extend consumer protection in the electronics' trade transactions / e-commerce as a whole, especially in the common situation where parties have jurisdictional differences. Whereas in the case of consumer disputes, the parties can take the matter through litigation (on court) as well as non-litigation (off court), in accordance to the agreement agreed by the parties. Nevertheless, the alternative online dispute resolutions can be implemented in full. This research recommends that the Government shall immediately form a Government Regulation related on trade/commerce transactions through an electronic system and to regulate online dispute resolutions.

Keywords: legal protection; consumers; e-commerce

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***Legal Protection of Food Agricultural Land
from Conversion to Non-Food Agricultural Land***

Dian Cahyaningrum

Abstract

The conversion of food agricultural land occurs in various region, including Karawang and Tabanan. Consequently, the sustainability of food supply is at stake. This paper examines the importance of legal protection on food agricultural land, the efforts to protect it, the cause of the conversion of food agricultural land, and its solution. This research is a normative and empirical legal research, by using secondary and primary data. Based on the results of the research, the food agricultural land is important to be protected in order to achieve sustainability of food supply, fulfill the people's rights to food, improve farmers' welfare, and preserve the environment. Efforts to protect are implemented preventively and repressively. Although protected, the conversion of food agricultural land continues to occur several cause are: the provisions on the protection of food agricultural land have not been followed up, there is demand on land for other purposes, and the farmer's low income. Several efforts to overcome this by formulating a regulation following up the provision on the protection of food agricultural land, the control of LP2B, and to protect and empower farmers. The central government/regional government must undertake all efforts in the protection of food agricultural land and transform the agricultural sector to be more appealing.

Keywords: conversion, food agricultural land; farmers; regional spatial plans

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***Protection of Patent Rights on Traditional Medicine Knowledge
Through Article 26 of Law No. 13 of 2016 Concerning Patents***

Trias Palupi Kurnianingrum

Abstract

Patent as a branch of Intellectual Property Rights (IPR) serves to protect inventions on the field of technology, one of them being medicine. The rise on the number of cases on the theft of genetic resources and traditional knowledge on the field of medicine for commercialization purposes shows that the protection of patent rights on traditional medicine knowledge is still not optimal. This article is the result of a normative juridical research which is supported by an empirical data, examines the protection of patent rights on traditional medicine knowledge and the implementation of Article 26 of Law No. 13 of 2016 on Patents (Patent Law year 2016). In the research results, it was mentioned that even though the TRIPs Agreement did not accommodate the traditional knowledge, the presence of Patent Law year 2016 complemented the Indonesian government's efforts to save the knowledge of traditional medicines from biopiracy and misappropriation. It is necessary to regulate the disclosure obligation in TRIPs agreement and further mechanism regarding benefit sharing and granting access to traditional medicines knowledge.

Keywords: biopiracy; patent; traditional medicine knowledge; protection

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

Women in prostitution: Construction of Legal Protection Towards Indonesian Women from a Juridical and Victimitarian Perspective

Yaris Adhial Fajrin and Ach. Faisol Triwijaya

Abstract

The practice of prostitution involving women as the main perpetrator creates a negative stigma that sees women as guilty persons. Even though there are also women who are involved in the practice of prostitution due to coercion. This condition creates a bias towards the position of the victim in the practice of prostitution. This paper is to examine the involvement of women in the practice of prostitution while also recognizing the position of women that are involved in the practice of prostitution. This research uses the normative juridical research method. Women in the prostitution network can be identified as victims due to both internal and external pressure. Women are perpetrators if involved without any pressure from other parties. Women are victims if they act as service providers, suffered, because of force by power from others, besides the relative requirements of women as victims of prostitution when involved in the practice of prostitution because they have been victims of sexual violence and make prostitution as livelihoods. Thus, it is hoped that legislators will soon be able to formulate limits on victims in the context of legal reform and just law enforcement.

Keywords: women; victims; prostitution; victimology; legal protection

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

***Return of State Financial Losses from The Payment of Substitute Money
Corruption Criminal Act, Can It Be Optimal?***

Puteri Hikmawati

Abstract

In addition to being subject to principle criminal penalties, the defendant in a corruption case may be subject to additional criminal penalty, in the form of payment of replacement money. The article which resulting of the normative juridical research with this qualitative approach, review regarding the return of the state financial losses shall be paid from the payment of substitute money in corruption criminal act can it be optimal? In the discussion, the penalty payment of substitute money has been stipulated in Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crime as amended by Law No. 20 of 2001. The amount of payment of substitute money shall be if possible equal with the assets obtained from the criminal act of corruption. If the substitute money is not paid, then the convicted person shall be liable to a prison sentence whose duration does not exceed the maximum sentence of the principal sentence. Therefore, the returning of financial losses cannot be optimal. The amount of compensation state finances needs to be increased, by confiscating and seizing the assets/properties of the perpetrator. The law concerning assets deprivation shall be established as the legal basis for assets seizure resulting from corruption.

Keywords: state financial loss; payment substitution money; criminal act; corruption

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charger*

Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization

Gema Perdana

Abstract

The neutrality of ASN and the politicization of the bureaucracy are still issues that need to be addressed immediately. This paper discusses the history of ASN neutrality arrangements; the influence of the bureaucratic politicization toward the ASN neutrality; and the role of KASN in manifesting the ASN neutrality. This paper is a result of a normative legal research, using the historical approach and statute approach. This paper is intended to contribute on the formulation of the ASN management that is free from the political intervention and works solely for the benefit of the nation and the state. In its history, the ASN's neutrality was highly influenced by the inclination of the legislators. The public officials, whether from a political background or independent, should not place the ASN as a tool to maintain their power. The new institution of the State Civil Apparatus Commission (KASN) is expected to be able to maintain the quality of the implementation of the merit system. Furthermore, the regulations are needed in order to restrict the access of public officials to conduct abuse of authority, also provide the access to strict supervision from the parties including the ASN's internal in order to be able to report any form of intervention.

Keywords: ASN neutrality; bureaucracy politicization; public services

*The Keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing.
These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge*

***Constitutional Question: New Alternative to Protect Citizen's
Constitutional Right From Concrete Review in Indonesia***

**Xavier Nugraha, Ave Maria Frisa Katherina, Safira Noor Ramadanty,
and Elma Putri Tanbun**

Abstract

The authority of the Constitutional Court in the current regulations in Indonesia still does not fully protect the constitutional rights of the citizens. This is reflected by seeing that the examination that were accommodated only covered the abstract review (there were no concrete cases in the court). This condition causes the absence of legal remedies to resolve the issue of constitutionality of legal norms in the court (concrete review), even though often the issue of constitutionality of laws is precisely found in court proceedings. This research is a dogmatic legal research. The primary legal material used is the Law of the Constitutional Court, whilst the secondary legal material consists of books, journals, and other relevant sources related to the issues discussed in this research. Based on this research, it was found that it is necessary to raise a constitutional question so that the Acts that are being examined can be annulled by the Constitutional Court and articles that are considered in contrary to the constitution cannot be used as a basis by the judge to decide related cases that being examined concretely.

Keywords: constitutional question; concrete review; Constitutional Court